

Jurnal Pijar
Studi Manajemen dan Bisnis

<https://e-journal.naurendigiton.com/index.php/pmb>

Vol. 4 No. 1, 2025, Hal. 1- 11

ISSN 2963-0606 (Online)

ISSN 2964-9749 (Print)

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
DI BIDANG LITBANG BAPPPEDA KOTA MADIUN**

**Evaldo Aryasatya Faadihilah¹, Amin Nur Adilah², Pinka Salma Salsabil³, Titis
Purwaningrum⁴**

Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Kabupaten Ponorogo

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dilaksanakan di Bidang Litbang Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) Kota Madiun serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Informan dipilih menggunakan purposive sampling, yaitu pegawai yang terlibat langsung dalam kegiatan Litbang, mulai dari kepala bidang, kepala subbidang, hingga staf pelaksana. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Litbang telah mengacu pada Renstra, RPJMD, dan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 80 Tahun 2020. Program yang dijalankan meliputi penyusunan sebelas dokumen kajian strategis, fasilitasi dan kompetisi inovasi daerah, pengelolaan Satu Data, serta koordinator evaluasi Smart City dan IPKD. Faktor penghambat pelaksanaan meliputi perbedaan persepsi antarpegawai, beban kerja yang menumpuk, serta kendala pemenuhan data dari perangkat daerah. Sementara itu, faktor pendukung meliputi regulasi yang kuat, koordinasi internal yang baik, serta dukungan pimpinan. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa optimalisasi koordinasi lintas perangkat daerah dan penguatan budaya inovasi diperlukan agar Litbang semakin efektif mendukung pembangunan Kota Madiun.

Kata Kunci: Implementasi, Penelitian, Pengembangan, Litbang, BAPPPEDA, Madiun

Abstract

This study aims to describe and analyze the implementation of Research and Development programs at Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) of Madiun City, as well as to identify the supporting and inhibiting factors influencing its execution. The research employed a qualitative descriptive approach with data collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. The population consisted of all employees involved in Litbang activities, while the sample was selected using purposive sampling, involving the Head of Division, Subdivision Heads, and relevant staff. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that the implementation of Litbang programs has been conducted in accordance with planning guidelines such as the RKPD, Renstra, and technical regulations, supported by effective communication, strong internal coordination, and clear regulatory frameworks. However, challenges remain, including differences in perceptions among employees, high workloads, and delays in data submission from regional apparatus organizations. The study implies the importance of strengthening cross-agency coordination, promoting an innovation-oriented culture, improving the quality of research outputs, and reinforcing the role of Litbang as the foundation for evidence-based policymaking in Madiun City.

Keywords:

Implementation, Research, Development, R&D, BAPPPEDA, Madiun

Alamat Korespondensi
Tuliskan alamat institusi
E-mail: evaldosatya@gmail.com

Pendahuluan

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedda) Kota Madiun merupakan perangkat daerah yang bertugas membantu Pemerintah Kota Madiun dalam merumuskan, mengoordinasikan, serta mengawal proses pembangunan daerah agar berjalan secara optimal. Sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan daerah, Bappedda berperan penting dalam menyerap aspirasi masyarakat mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan, serta menjalin koordinasi dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam menyusun rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Peran ini memastikan bahwa setiap program pembangunan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan prioritas pembangunan Kota Madiun. Fungsi pokok Bappedda adalah merumuskan rencana pembangunan daerah, mencakup rencana jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Selain itu, Bappedda bertugas mengoordinasikan serta mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas wilayah. Di samping itu, Bappedda juga memiliki struktur organisasi yang tersusun secara sistematis, antara lain: Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Bidang Penelitian dan Pengembangan, UPTB, Kelompok Jabatan Fungsional (Pemerintah Kota Madiun, 2020).

Melihat bahwa proses perencanaan dan penganggaran daerah harus dilaksanakan secara tepat, tertib, efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan peninjauan terhadap implementasi atau pelaksanaan program Litbang yang dibiayai dan disesuaikan dengan RKPD. Pelaksanaan di tiap bidang menunjukkan hasil yang beragam, tergantung pada program kerja masing-masing serta alokasi anggaran yang dimiliki oleh tiap bidang di BAPPEDA Kota Madiun. Pada unsur organisasi Bappedda Kota Madiun, khususnya pada Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) atau yang kini terintegrasi dalam Bappelitbangda Kota Madiun, terdapat peran strategis dalam penyusunan kebijakan teknis, penyusunan program, pengelolaan anggaran, serta fasilitasi pelaksanaan riset dan inovasi daerah. Fungsi tersebut ditegaskan melalui Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 80 Tahun 2020 mengenai kedudukan, susunan organisasi, dan rincian tugas Bappedda.

Bidang Litbang memiliki mandat penting dalam menjalankan aktivitas penelitian yang berorientasi pada kebutuhan pembangunan daerah. Dalam dokumen tugas pokok dan fungsi Bappedda Kota Madiun disebutkan bahwa bidang ini berfungsi menyusun pedoman dan standar teknis penelitian, melaksanakan analisis data, mengembangkan inovasi daerah, serta mengelola administrasi penelitian dan pengembangan secara terpadu. Selain itu, Bidang Litbang juga menjalankan koordinasi lintas perangkat daerah, perguruan tinggi, serta lembaga penelitian sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa riset dan inovasi didasarkan pada data yang valid dan relevan. Hal ini sekaligus menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) sehingga pembangunan Kota Madiun dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Di bidang Litbang, program-program yang disusun direncanakan secara matang dan sistematis. Setiap program selalu berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah, karena implementasi kegiatan penelitian dan pengembangan harus memiliki dukungan anggaran yang jelas dan terukur. Pengelolaan keuangan dalam kegiatan Litbang tidak hanya berdasar kebutuhan teknis, tetapi harus memenuhi aspek akuntabilitas, ketertiban administrasi, dan keterpaduan dengan dokumen perencanaan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dalam kegiatan Litbang Bappedda Kota Madiun berpedoman pada aturan nasional, mulai dari ketentuan umum yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah, hingga regulasi yang lebih spesifik seperti Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 mengenai klasifikasi, kodifikasi,

dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Regulasi ini memastikan bahwa setiap rencana program Litbang, penganggaran, serta pelaksanaannya selaras dengan standar nasional yang berlaku.

Dengan adanya pedoman tersebut, perencanaan dan penganggaran daerah harus dilakukan secara tepat, tertib, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, implementasi program-program Litbang di Kota Madiun harus sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), karena RKPD menjadi acuan tahunan dalam penyusunan arah kegiatan dan anggaran. Bidang Litbang berperan untuk memastikan bahwa kegiatan penelitian yang direncanakan di RKPD dapat dilaksanakan dan memiliki manfaat bagi pembangunan daerah. Dari pelaksanaan program yang dilakukan setiap bidang di Bappeda Kota Madiun, termasuk Bidang Litbang, hasil yang dicapai akan berbeda-beda sesuai dengan tujuan program, karakteristik data yang dikaji, dan besaran anggaran yang dialokasikan. Hal ini menggambarkan bahwa keberhasilan program Litbang sangat dipengaruhi oleh perencanaan yang tepat, penganggaran yang akuntabel, serta pelaksanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Kota Madiun. Secara keseluruhan, Bidang Litbang Bappeda Kota Madiun mempunyai peran sentral dalam menyediakan dasar ilmiah dan data strategis untuk perencanaan pembangunan. Mulai dari penyusunan kajian, pelaksanaan penelitian, hingga pengembangan inovasi daerah, seluruh aktivitas Litbang mendukung tujuan utama pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kemajuan masyarakat Kota Madiun.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau bagaimana implementasi dan pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Litbang yang didanai serta dijalankan sesuai dengan RKPD, serta berpedoman pada kebijakan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 (Kumolo, 2019). Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk tahun berikutnya. Dengan demikian, gambaran mengenai pelaksanaan program di Bidang Litbang Bappeda Kota Madiun dapat diperoleh. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Madiun.
2. Menganalisis faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Program Penelitian dan Pengembangan (Litbang) di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Madiun.

Landasan Teori

Landasan teori berfungsi sebagai dasar utama yang menopang keseluruhan struktur ilmiah yang dibangun. Tanpa landasan yang kuat dan relevan, penelitian dapat kehilangan arah, menjadi kurang terorganisasi, dan bahkan gagal menjawab pertanyaan-pertanyaan inti yang ingin dipecahkan. Landasan teori bukan sekadar kumpulan pendapat para ahli, tetapi merupakan rangkaian gagasan yang diintegrasikan sehingga membentuk kerangka konseptual penelitian. Landasan ini membantu menjelaskan, menafsirkan, serta membimbing peneliti dalam memahami konteks dan hubungan antar variabel yang diteliti (Fathurokhmah, 2024). Beberapa aspek yang penting yang perlu dibahas dalam landasan teori antara lain:

Administrasi Publik

Administrasi publik pada hakikatnya dapat dipahami sebagai serangkaian proses pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dalam praktiknya, administrasi publik meliputi berbagai aktivitas inti seperti perencanaan kebijakan, pengorganisasian sumber daya, pemberian arahan dalam pelaksanaan program, pengawasan terhadap jalannya pelayanan, serta evaluasi atas efektivitas

kebijakan publik yang diterapkan oleh lembaga pemerintah. Melalui fungsi-fungsi tersebut, administrasi publik menjadi instrumen yang memungkinkan pemerintah mengelola urusan masyarakat secara terstruktur, sistematis, dan terukur. Selain itu, administrasi publik tidak hanya berfokus pada proses internal pemerintahan, tetapi juga pada bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat melalui pelayanan publik. Konsep ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan responsivitas dalam setiap tindakan pemerintah. Administrasi publik juga berkembang seiring perubahan zaman, menyesuaikan diri dengan tuntutan digitalisasi, partisipasi masyarakat, serta dinamika sosial-politik yang semakin kompleks. Dengan demikian, administrasi publik berperan sebagai fondasi penting dalam memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang efektif, efisien, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. (Heliastuti et al., 2025).

Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik (*public policy*) dalam kajian administrasi publik dipahami sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah untuk memecahkan masalah bersama. Salah satu definisi yang paling banyak dikutip berasal dari Thomas R. Dye, yang menyatakan bahwa '*public policy is whatever governments choose to do or not to do*'. Definisi ini menegaskan bahwa kebijakan publik tidak hanya berupa tindakan positif pemerintah, seperti pengesahan peraturan atau pelaksanaan program pembangunan, namun juga mencakup keputusan untuk tidak bertindak yang tetap memiliki implikasi terhadap masyarakat. Secara teoritis, kebijakan selalu terkait dengan masalah publik yang menuntut respons pemerintah serta berkaitan dengan alokasi sumber daya negara (Muchtar et al., 2022).

Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses penerjemahan suatu kebijakan publik ke dalam tindakan nyata melalui berbagai program, aktivitas, dan mekanisme kerja yang telah ditetapkan dalam suatu sistem pemerintahan. Implementasi ini mencakup langkah-langkah operasional yang dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dan arah kebijakan dapat diwujudkan secara tepat di lapangan. Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting, seperti kewenangan, ketersediaan sumber daya, kualitas komunikasi antar pelaksana kebijakan, serta disposisi atau sikap para pelaksana. Selain itu, implementasi kebijakan dapat dinilai melalui beberapa dimensi, antara lain konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi. Evaluasi terhadap implementasi kebijakan perlu dilakukan secara menyeluruh mulai dari tahap sebelum pelaksanaan (*ex-ante*), ketika proses berjalan (*on-going*), hingga setelah kebijakan diterapkan (*ex-post*). Dalam prosesnya, pelaksana kebijakan dapat melakukan inovasi atau diskresi selama tidak bertentangan dengan norma serta regulasi yang berlaku (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) merupakan lembaga teknis daerah yang bertugas menyelenggarakan kebijakan teknik bidang perencanaan pembangunan daerah kota, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Perencanaan Kota dibidang Pembangunan Daerah. Perencanaan daerah tersebut meliputi aspek fisik, sosial dan budaya, pemerintahan, pendanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi, menyelenggarakan dan perencanaan Daerah Kabupaten/Kota, serta mengidentifikasi, mengelola dan menganalisis data pembangunan (Mahmudah et al., 2022). Penelitian oleh (Maramis et al., 2021) menjelaskan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mewadahi fungsi bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan, bidang perekonomian, sumber daya alam dan infrastruktur, bidang sosial budaya dan pemerintahan dalam suatu system perangkat kerja daerah.

Metode

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bersifat mendalam dan komprehensif untuk memahami serta menjelaskan suatu fenomena dalam konteks alamiahnya (Rachman et al., 2024). Pendekatan ini lebih menekankan pada makna, interpretasi, dan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti, bukan sekadar penyajian angka atau data statistik. Penelitian kualitatif bertujuan menggali informasi yang kompleks, terperinci, serta sulit diukur melalui pendekatan kuantitatif, khususnya pada fenomena yang belum banyak diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan beberapa informan mulai dari Kepala Bidang (Kabid), Kepala Subbidang (Kasubid), hingga staf, serta studi pustaka yang bersumber dari berbagai regulasi dan dokumen pendukung. Objek penelitian difokuskan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) Kota Madiun, sebagai instansi yang memiliki peran penting dalam perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.

Sejumlah teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian kualitatif, antara lain wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti memperoleh pandangan, pengalaman, dan pemahaman mendalam dari narasumber. Observasi partisipatif memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menggali fenomena secara langsung dalam konteks alami. Sementara itu, analisis dokumen digunakan untuk memahami latar belakang, regulasi, dan informasi tertulis yang relevan dengan fokus penelitian (Rachman et al., 2024).

Penelitian ini dilakukan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) Kota Madiun pada bulan September–November. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut didasarkan pada penilaian peneliti mengenai siapa saja individu yang dianggap paling mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga dapat memudahkan proses pengumpulan data. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) Kota Madiun. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari informasi yang disampaikan oleh para informan serta dari data tertulis yang mendukung. Secara keseluruhan, data yang digunakan terdiri atas dua jenis:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan.
2. Data sekunder, berupa dokumen, regulasi, laporan, dan arsip yang relevan untuk memperkuat interpretasi penelitian.

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih, menyederhanakan, mengelompokkan, serta merangkum informasi yang relevan dengan topik penelitian, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih terfokus dan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang diteliti. Proses reduksi data membantu peneliti menajamkan hasil temuan lapangan dan mengorganisasi data sesuai kebutuhan analisis. Hasil penelitian yang disajikan merupakan data yang telah diolah dan ditafsirkan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, sehingga mencerminkan kondisi empiris secara objektif dan sesuai dengan realitas penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa pihak terkait, serta didukung oleh temuan dari kegiatan observasi, dokumentasi, dan studi pustaka, pembahasan selanjutnya akan menguraikan secara lebih mendalam tujuan dari penelitian ini. Tujuan tersebut berfokus pada upaya untuk mengidentifikasi, menggambarkan, serta memahami secara komprehensif bagaimana proses pelaksanaan program penelitian dan pengembangan (Litbang) dijalankan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) Kota Madiun, termasuk dinamika, strategi, serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai implementasi program penelitian dan pengembangan pada Bidang Litbang di BAPPPEDA Kota Madiun, diketahui bahwa standar, sasaran, serta ukuran keberhasilan kebijakan di bidang tersebut disusun dengan mengacu pada berbagai dokumen perencanaan. Pelaksanaan kegiatan Litbang berpedoman pada Renstra dan RPJMD, serta diperkuat oleh ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 80 Tahun 2020 yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) Kota Madiun.

Hasil wawancara pada poin selanjutnya, yaitu terkait sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program di Bidang Litbang di BAPPPEDA Kota Madiun, menunjukkan bahwa terdapat dua jenis sumber daya utama yang berperan dalam mendukung keberlangsungan program. Sumber daya pertama adalah pendanaan, yang seluruhnya mengacu pada pagu anggaran BAPPPEDA dalam APBD. Pendanaan ini digunakan untuk menyusun dan melaksanakan berbagai program penelitian dan pengembangan. Secara umum, kebutuhan pendanaan untuk kegiatan rutin dan yang telah direncanakan dapat terpenuhi dengan baik, meskipun pada kondisi tertentu seperti ketika terdapat tugas tambahan di luar rencana, anggaran yang tersedia menjadi relatif terbatas dalam mencukupi keseluruhan kebutuhan program. Sumber daya kedua adalah sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan hasil wawancara, kompetensi SDM yang ada saat ini dinilai telah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, terutama dalam hal pemahaman terhadap penelitian dan pengembangan daerah.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa pola komunikasi dan koordinasi di Bidang Litbang BAPPPEDA Kota Madiun berjalan dengan baik, terarah, dan mendukung kelancaran pelaksanaan program litbang. Komunikasi antarpegawai terjalin secara intens melalui beberapa mekanisme yang telah ditetapkan, seperti pembentukan tim pelaksana kegiatan, pembuatan Grup WhatsApp khusus sesuai tema atau jenis pekerjaan, penyediaan klinik konsultasi, serta pelaksanaan pendampingan (desk) kepada perangkat daerah. Selain komunikasi internal, koordinasi lintas bidang di lingkungan BAPPPEDA juga dilakukan secara rutin untuk memastikan keterpaduan antarprogram. Hubungan kerja yang harmonis tercermin dari adanya saling membantu antarpegawai dalam menyelesaikan tugas, serta komitmen bersama untuk mencapai tujuan program litbang secara efektif. Pola komunikasi yang terbuka dan responsif ini menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif, sehingga mempermudah proses penyelesaian dokumen riset, kajian, maupun inovasi daerah.

Pada awal tahun, Bidang Litbang menyusun rencana kerja tahunan yang mengacu pada Renstra BAPPPEDA dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Rencana tersebut menjadi pedoman penyusunan agenda kegiatan yang terstruktur dari awal hingga akhir tahun. Setelah agenda kerja ditetapkan, pembagian tugas dilakukan secara berjenjang, mulai dari Kepala Bidang kepada masing-masing subkoordinator, kemudian diteruskan kepada staf sesuai dengan uraian tugas yang tercantum di dalam aplikasi e-KAK dan pohon kinerja ASN. Pembagian tugas yang sistematis memastikan setiap pegawai mengetahui tanggung jawab dan target yang harus dicapai.

Dalam proses pelaksanaan program, Bidang Litbang juga menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala sesuai timeline kegiatan. Setiap pegawai diberikan ruang untuk menyampaikan

perkembangan pekerjaan, kendala yang dihadapi, maupun usulan perbaikan. Hal ini memungkinkan adanya evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kualitas pelaksanaan program. Dengan pola komunikasi yang efektif, koordinasi yang solid, serta pembagian tugas yang jelas, pelaksanaan program litbang di BAPPPEDA Kota Madiun dapat berjalan dengan lancar dan terarah. Lingkungan kerja yang mendukung dan kepemimpinan yang responsif turut menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja pegawai serta kualitas inovasi dan kajian yang dihasilkan.

Pelaksanaan program di Bidang Litbang BAPPPEDA Kota Madiun dihadapkan pada beberapa hambatan yang berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan penelitian dan pengembangan. Hambatan pertama yang muncul adalah perbedaan persepsi dan pemahaman antarpegawai, yang sesekali menimbulkan perbedaan pandangan dalam diskusi internal. Perbedaan ini dapat memperlambat proses pengambilan keputusan, karena diperlukan waktu tambahan untuk menyatukan pendapat serta menentukan langkah terbaik yang dapat diterima bersama. Hambatan kedua berkaitan dengan variasi beban kerja dan tingkat kesulitan kegiatan. Pada periode tertentu, beberapa program harus dilaksanakan secara bersamaan, sehingga pegawai dituntut untuk bekerja lebih intensif agar seluruh kegiatan dapat diselesaikan sesuai timeline. Kondisi ini membuat penyelesaian pekerjaan membutuhkan waktu dan tenaga ekstra, terutama ketika program yang dijalankan memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda.

Selain itu, Bidang Litbang juga menghadapi kendala dalam koordinasi dengan perangkat daerah atau pihak eksternal, khususnya terkait pemenuhan data yang dibutuhkan. Beberapa perangkat daerah diketahui terlambat dalam menyediakan data, sehingga proses penyusunan kajian, analisis, maupun inovasi daerah menjadi terhambat. Keterlambatan data ini berdampak pada mundurnya alur kerja dan dapat memengaruhi ketepatan waktu penyelesaian dokumen litbang yang direncanakan. Secara keseluruhan, faktor penghambat tersebut menunjukkan bahwa tantangan dalam pelaksanaan program litbang tidak hanya terkait aspek teknis, tetapi juga menyangkut dinamika koordinasi, manajemen waktu, dan kesiapan data pendukung.

Selain hambatan yang ditemui dalam proses pelaksanaan program, hasil wawancara menunjukkan bahwa Bidang Litbang BAPPPEDA Kota Madiun juga memiliki sejumlah faktor pendukung yang berperan penting dalam memperlancar implementasi penelitian dan pengembangan daerah. Faktor pendukung pertama adalah adanya landasan regulasi yang kuat, mencakup Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, Renstra, serta dokumen kelembagaan lain yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi Bidang Litbang. Kejelasan regulasi ini memungkinkan setiap pegawai bekerja sesuai tupoksi masing-masing tanpa terjadi tumpang tindih kewenangan, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih terarah. Faktor pendukung berikutnya adalah kondisi komunikasi dan kerja sama antarpegawai yang baik. Setiap staf dapat berkoordinasi secara efektif melalui berbagai kanal komunikasi, baik dalam forum formal maupun melalui media komunikasi internal. Selain itu, dukungan dari pimpinan menjadi faktor pendukung yang signifikan. Kepala bidang dan jajaran pimpinan BAPPPEDA memberikan dukungan penuh, baik berupa arahan, fasilitasi, maupun penguatan koordinasi lintas bidang. Sikap pimpinan yang responsif dan komunikatif membantu mempercepat penyelesaian kendala yang muncul selama proses pelaksanaan program. Dukungan ini juga berperan dalam menjaga motivasi pegawai untuk tetap berinovasi dan meningkatkan kualitas kinerja.

Bidang Litbang Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (BAPPPEDA) Daerah Kota Madiun pada tahun 2025 melaksanakan berbagai program penelitian dan inovasi yang menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Program-program ini mencakup penyusunan dokumen kajian strategis, fasilitasi inovasi daerah, koordinasi lintas perangkat daerah, serta pelaksanaan tugas-tugas strategis yang mendukung pembangunan berbasis data dan teknologi. Secara keseluruhan, kegiatan tersebut tidak hanya memperkuat

fondasi perencanaan berbasis bukti, tetapi juga mendorong terbentuknya budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Pada fungsi penelitian dan kajian, Bidang Litbang menyusun 11 dokumen kajian prioritas yang meliputi berbagai sektor penting daerah. Kajian tersebut mencakup: Studi Kelayakan Landfill Mining Zona Pasif TPA Winongo, penyusunan Indeks Rasa Aman dan Indeks Ketentraman Kota Madiun Tahun 2025, penyusunan JAKSTRADA SPAM 2025–2029, Kajian Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Kota Madiun, Peta Jalan Pendidikan Kota Madiun 2025–2045 menuju Smart City, Kajian Nilai Bangunan PBB-P2, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID) 2025–2029, Kajian Penataan Sekolah (School Mapping), Kajian Penataan Kawasan Bogowonto, serta Kajian Perhitungan Perkiraan Kewajaran Harga Tanah untuk penyesuaian kawasan perumahan Kota Madiun Tahun 2025. Dokumen-dokumen ini menjadi dasar kuat dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah secara lebih terukur dan akuntabel.

Pada aspek inovasi, Bidang Litbang menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Tingkat Kota Madiun (KIAT) sebagai wadah bagi perangkat daerah, sekolah, puskesmas, dan unit layanan publik lainnya untuk menghadirkan terobosan pelayanan. Selain itu, terdapat partisipasi aktif dalam Kompetisi Inotek Award Provinsi Jawa Timur dan pelaporan inovasi ke Innovative Government Award (IGA) Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 2025, Kota Madiun berhasil melaporkan 76 inovasi daerah, menunjukkan tingginya komitmen pemerintah kota dalam mendorong inovasi lintas sektor.

Selain kegiatan utama tersebut, Bidang Litbang juga melaksanakan sejumlah tugas strategis lainnya, antara lain mengikuti penilaian UI Green City Metric, menjadi Koordinator Penilaian Indeks Penyelenggaraan Keuangan Daerah (IPKD), menjadi Koordinator Evaluasi Smart City Kota Madiun, serta menjalankan fungsi sekretariat Satu Data Kota Madiun. Tugas-tugas ini memperlihatkan peran penting Bidang Litbang dalam memastikan keterpaduan data, keterlacakan kinerja keuangan daerah, pembangunan kota cerdas, serta keberlanjutan lingkungan berdasarkan prinsip-prinsip green city.

Kemudian program inovasi unggulan Kota Madiun yang diangkat dalam kegiatan litbang meliputi program Be Smart sebagai bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, pemberian beasiswa bagi aparatur pemerintah hingga jenjang S3, pengembangan kawasan Pahlawan Street Center (PSC) dengan konsep miniatur enam negara, inovasi Warteki (Warung Tekan Inflasi) sebagai strategi pengendalian inflasi, pengelolaan kawasan TPA menjadi area wisata edukatif, layanan administrasi kependudukan tujuh hari sepekan dan gratis, serta program perlindungan tenaga kerja nonformal dan asuransi kesehatan bagi seluruh warga Kota Madiun.

Dalam pelaksanaan program penelitian dan pengembangan di BAPPPEDA Kota Madiun, terdapat beberapa aspek yang dinilai masih perlu ditingkatkan agar kegiatan Litbang dapat berjalan lebih optimal. Salah satu kebutuhan penting adalah peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, mengingat inovasi daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab Bidang Litbang, tetapi juga merupakan hasil orkestrasi bersama seluruh perangkat daerah. Selain itu, budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu terus diperkuat, baik melalui peningkatan kapasitas pegawai maupun penyediaan ruang yang lebih luas bagi munculnya gagasan-gagasan baru. Upaya lain yang juga menjadi prioritas adalah peningkatan kualitas Satuan Inovasi Daerah (SID) serta jumlah proposal inovasi yang memenuhi standar penilaian KemenPAN-RB maupun Kemendagri. Penguatan kerja tim di lingkungan BAPPPEDA turut menjadi perhatian penting agar kolaborasi internal semakin solid dan mampu menghasilkan kinerja yang lebih maksimal.

Terkait harapan ke depan, pengembangan Litbang di Kota Madiun diharapkan mampu mendorong peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID) serta menghasilkan inovasi yang semakin berkualitas, terutama inovasi yang diikutsertakan dalam ajang kompetisi tingkat daerah, provinsi, maupun nasional. Selain itu, peningkatan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) menjadi salah satu target strategis yang ingin dicapai melalui penguatan riset dan inovasi daerah.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program penelitian dan pengembangan (Litbang) di BAPPPEDA Kota Madiun telah berjalan secara terarah dan mengacu pada berbagai regulasi serta dokumen perencanaan daerah, seperti Renstra, RPJMD, dan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 80 Tahun 2020. Pelaksanaan program Litbang mencakup penyusunan dokumen kajian strategis, fasilitasi inovasi daerah, koordinasi lintas sektor, hingga pelaksanaan tugas-tugas strategis yang mendukung pembangunan berbasis data, teknologi, dan inovasi. Seluruh program tersebut memiliki kontribusi penting dalam menyediakan landasan ilmiah bagi proses perencanaan pembangunan daerah. Dari aspek sumber daya, dua komponen utama yang memengaruhi pelaksanaan program Litbang adalah pendanaan dan sumber daya manusia. Pendanaan pada umumnya dapat terpenuhi untuk kegiatan yang telah direncanakan, meskipun menjadi terbatas ketika terdapat tugas tambahan di luar rencana awal. Kompetensi SDM dinilai memadai dan relevan dengan kebutuhan penelitian dan pengembangan daerah, khususnya dalam memahami proses penyusunan kajian, inovasi, serta pengelolaan data. Pola komunikasi di Bidang Litbang juga menjadi faktor penting dalam mendukung terlaksananya program secara efektif. Koordinasi internal, komunikasi melalui forum maupun media digital, serta mekanisme monitoring dan evaluasi rutin membantu memastikan setiap pegawai memahami tugas, target, serta perkembangan kegiatan. Kondisi lingkungan kerja yang harmonis dan kepemimpinan yang responsif turut meningkatkan kualitas pelaksanaan program.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah hambatan dalam implementasi program Litbang, seperti perbedaan persepsi antarpegawai, variasi beban dan tingkat kompleksitas pekerjaan, serta kendala dalam memperoleh data dari perangkat daerah. Tantangan koordinasi eksternal ini berdampak pada keterlambatan penyelesaian dokumen kajian maupun inovasi. Meskipun begitu, hambatan tersebut dapat diatasi melalui penguatan komunikasi, pengaturan beban kerja, serta peningkatan disiplin pelaporan data. Di sisi lain, terdapat faktor pendukung yang memperkuat pelaksanaan program Litbang, meliputi landasan regulasi yang jelas, komunikasi dan kerja sama antarpegawai yang baik, serta dukungan penuh dari pimpinan. Selain itu, peran Litbang juga semakin diperkuat dengan keterlibatannya dalam berbagai program strategis seperti penilaian UI Green City Metric, koordinator IPKD, koordinator evaluasi Smart City, dan sekretariat Satu Data Kota Madiun. Berdasarkan temuan tersebut, pengembangan Litbang ke depan perlu diarahkan pada peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, penguatan budaya inovasi di lingkungan pemerintah kota, peningkatan kualitas proposal inovasi melalui Satuan Inovasi Daerah, serta penguatan kerja tim di BAPPPEDA. Harapan ke depan adalah meningkatnya Indeks Inovasi Daerah (IID), kualitas inovasi yang diikutsertakan pada kompetisi, peningkatan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), serta terwujudnya pembangunan Kota Madiun yang semakin berbasis bukti dan riset.

Daftar Referensi

- Fathurokhmah, F. (2024). *Metodologi Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Bumi Aksara.
- Helpiastuti, S. B., Negoro, A. H. S., Bormasa, M. F., Alaslan, A., Abdurahman, Hendri, K., Zairusi, Subandi, M., Musmuliadi, Holivil, E., & Effendi, D. (2025). *PENGANTAR ADMINISTRASI PUBLIK: TINJAUAN TEORI*. Widina Media Utama.
- Kumolo, T. (2019). *PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90*

TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH.

- Mahmudah, F., Fatma Mokodongan, E., & Sutarni Arifin, S. (2022). Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Gorontalo. *JAMBURA Journal of Architecture*, 4(2), 55–59.
- Maramis, A., Nayoan, H., & Waworundeng, W. (2021). Peran Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan (Bapelitbang) Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Minahasa Utara. *Usman (2004:7)*, 1(2), 1–10.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/36214/33721>
- Muchtar, M., Heriyandi, H., & Bin Hasyim, S. (2022). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Surat Dan Pengarsipan Di Sekretariat Daerah Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 13(1), 44–61. <https://doi.org/10.36624/jpkp.v13i1.111>
- Pemerintah Kota Madiun. (2020). *Peraturan Walikota Madiun Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.*
- Rachman, A., Yochanan, Samanlangi, A. I., & Purnomo, H. (2024). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D*. CV Saba Jaya Publisher.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>